

Bagaimana Pengelolaan Ekuitas Berfungsi di UMKM? (Pendekatan Tingkat UMKM)

Made Irma Lestari*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Wiyatamandala

E-mail: madeirmalestari@gmail.com

^{*)}Correspondence author

Abstract

This exploratory study with a qualitative approach aims to provide an overview about the condition of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia regarding the concept of equity management based on the economic entity assumption. Whereas equity (owner's capital and operating profit) is the acquisition of funds of the business that must be separated from the private entity that owns the funds. Research data are primary data obtained by data collection methods of in-depth interviews and direct observation. Guided by the latest regulation, PP Nomor 7 Tahun 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Koperasi and Micro, Small, and Medium Enterprises, researcher received responses from five business actors, each representing micro, small, and medium enterprises. This study found that the response of business actors at the micro, small, and medium levels was quite good about the awareness of separating business equity from private equity. However, in practice, the practice of equity management is proportional to the level of business, which means that the higher the level of business, the better the implementation of equity management that can be done. Implementation of equity management in small and medium enterprises is better than micro enterprises. With the enactment of PP Nomor 7 Tahun 2021, the government has expressed a commitment to raise micro-enterprises to the advance level. Thereby from this research, it is hoped that the government can make the issue of equity management in MSMEs as focus of regular guidance and assistance, especially for micro-enterprises.

Keywords: Management Equity; Economic Entity Assumption; MSME

Abstrak

Studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran tentang keadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terkait konsep manajemen ekuitas yang didasarkan pada prinsip kesatuan usaha (*economic entity assumption*). Bahwasannya, ekuitas (modal pemilik dan laba usaha) merupakan pemerolehan dana pada entitas usaha yang harus dipisah dari entitas pribadi pemilik dana. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan metode pengumpulan data *in-depth interview* dan pengamatan langsung. Berpedoman pada aturan terbaru, PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peneliti memperoleh respon dari lima orang pelaku usaha yang masing-masing mewakili usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini mendapati bahwa respon pelaku usaha baik di level mikro, kecil, dan menengah sudah cukup baik tentang kesadaran pemisahan ekuitas usaha dengan ekuitas milik pribadi. Namun dalam penerapannya, praktik manajemen ekuitas sebanding dengan level usahanya, yang berarti bahwa semakin tinggi level usaha semakin baik pula penerapan manajemen ekuitas yang dapat dilakukan. Penerapan manajemen ekuitas pada usaha kecil dan menengah lebih baik dari usaha mikro. Dengan diberlakukannya PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah menyatakan komitmen untuk menaikkan level usaha mikro sehingga bisa naik kelas. Maka dari penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat menjadikan isu manajemen ekuitas pada UMKM sebagai fokus pembinaan dan pendampingan secara berkala, khususnya pada usaha mikro.

Kata kunci: Manajemen Ekuitas; *Economic Entity Assumption*; UMKM

PENDAHULUAN

Dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa post pandemi covid-19 saat ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Pandemi covid-19 memberikan dampak buruk pada perkembangan UMKM di Indonesia. Pada tahun 2020 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan 30 juta UMKM menjadi bangkrut karena dampak pandemi covid-19. Sementara di tahun 2021, Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa 87,5% UMKM mengalami penurunan pendapatan hingga 15% (Toarik, 2021).

Krisis pengelolaan keuangan pada UMKM di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sering diabaikan oleh para pelaku UMKM dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Pengelolaan keuangan UMKM dalam konsep manajemen ekuitas dapat dijelaskan dengan persamaan fungsi penggunaan dana dan pemerolehan dana (Warsono, 2010). Penggunaan dana bagi UMKM dapat berbentuk aset (lazim dikenal sebagai aktiva), biaya yang diakui, dan pengembalian dana dari UMKM ke pemilik. Adapun pemerolehan dana dapat bersumber dari utang (pinjaman dari kreditor), ekuitas (pendanaan yang berasal dari setoran modal pemilik, laba yang dihasilkan UMKM, maupun pendanaan dari sumber lain-lain selain utang), dan pendapatan yang dihasilkan UMKM. Sehingga manajemen ekuitas yang didasarkan pada *economic entity assumption* merupakan pengelolaan pendanaan suatu entitas yang seharusnya dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain.

Masalah manajemen ekuitas ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi yang dimiliki pelaku usaha mengenai pengelolaan keuangan sangat terbatas, latar belakang pendidikan para pelaku usaha juga mempengaruhi pengetahuan para pelaku usaha (Irawan & Wardhani, 2021). Beberapa pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba (Setyorini, 2010). Banyak pelaku UMKM merasa bahwa usaha mereka berjalan normal namun sebenarnya UMKM tersebut tidak mengalami perkembangan. *Sustainability* usaha menjadi momok UMKM di Indonesia.

Dalam hal ini, *sustainability* usaha di masa krisis dapat dicapai dengan melakukan pengelolaan keuangan dalam manajemen ekuitas yang baik. Realitanya, menurut Sari (2013), menunjukkan bahwa saat ini UMKM kurang memperhatikan dan menerapkan akuntansi dalam kehidupan sosial. Perlu disadari bahwa pemahaman budaya “sami mawon” yang banyak diusung oleh pelaku UMKM harus dilunturkan dengan pencangkokan konsep kesatuan usaha dalam akuntansi. Sangat disayangkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman cukup baik dalam manajemen ekuitas. Menurut penelitian Irawan dan Wardhani (2021), penerapan konsep entitas dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan “Lamikro” pada UMKM masih sangat kurang untuk diterapkan. Pemahaman dan kompetensi yang kurang berakibat pada penerapan pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Hal ini terdukung oleh penelitian Larasdiputra dan Suwitari (2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi *knowledge management* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM berbasis *economic entity*.

Penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan ekuitas keuangan oleh pelaku usaha UMKM. Berdasarkan pengamatan awal peneliti dan seperti dijelaskan pada penelitian terdahulu di atas, para pelaku UMKM tidak memisahkan antara ekuitas milik usaha dengan ekuitas milik pribadi. Maka kesalahan yang terjadi ialah ekuitas yang seharusnya digunakan untuk

pengembangan usaha habis digunakan untuk keperluan pribadi. Alhasil usaha tidak kunjung berkembang. Di sisi lain, Pemerintah sudah gencar menjalankan sejumlah program demi mendukung *sustainability* usaha UMKM di Indonesia. Salah satunya memberi kemudahan akses pendanaan untuk UMKM dari lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti Bank Konvensional maupun pinjaman online legal (*financial technology*). Transformasi digital untuk tata Kelola UMKM juga menjadi kebijakan untuk mempermudah akses jalan bagi UMKM menuju naik kelas.

Prioritas pemerintah terfokus pada kemudahan memperoleh dana. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa ketika dana sudah tersedia maka UMKM dapat berkembang. Namun, anomali di lapangan tidak demikian. Bahwasannya setelah dana tersebut diperoleh, dana belum dapat dikelola dengan baik untuk mengembangkan usaha dan menaikkan kelas UMKM. Faktanya, tidak jarang UMKM mengalami gagal bayar karena dana yang dipinjam hanya menghasilkan keuntungan yang stagnan atau malah menjadi rugi. Ketika ketersediaan dana untuk usaha menjadi faktor utama kesuksesan, maka bagaimana cara pelaku usaha dapat mengelola dana tersebut menjadi faktor penentu kesuksesan berikutnya. Fakta berikutnya, pelaku UMKM di Indonesia terlalu banyak menempati kelas mikro sehingga terdapat kekosongan pada kelas usaha kecil dan menengah.

Terdapat perubahan kriteria kelas UMKM yang semula berdasar pada UU Nomor 8 Tahun 2008 diubah menjadi PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SesKemenKopUKM. Arif R. Hakim (2022), saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Koperasi Indonesia di kampus IKOPIN Jatiningor, menyampaikan bahwa batasan pelaku usaha mikro sengaja disejajarkan dengan beberapa negara lain, dan agar cakupan pendampingan kepada pelaku usaha mikro bisa lebih luas. Batasan pelaku usaha mikro dilebarkan menjadi modal usaha sampai Rp2 miliar, meskipun sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki modal usaha di bawah Rp300 juta. Sehingga jumlah pelaku usaha mikro kini menjadi 63,96 juta atau 99,62 persen dari total pelaku usaha UMKM (Kemenkopukm, 2022). Pergantian kebijakan tersebut memberikan gambaran komitmen dan dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas UMKM sehingga dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan naik kelas.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia dapat mencerminkan sebagian besar data keadaan UMKM di Indonesia. Berikut tabel persebaran UMKM di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1. Sebaran UMKM di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM Ditemukan
1	Administrasi Kepulauan Seribu	3210
2	Jakarta Selatan	210022
3	Jakarta Timur	240512
4	Jakarta Pusat	138304
5	Jakarta Barat	272761
6	Jakarta Utara	197179

Sumber: Data sekunder, laman resmi DepKop, umkm.depkop.go.id, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jakarta Barat memiliki jumlah persebaran UMKM terbesar di DKI Jakarta. Maka, penulis memusatkan pengambilan sampel di Jakarta Barat sebagai populasi penelitian ini.

Pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah diajukan untuk dapat terjawab pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pemahaman Pelaku usaha tentang manajemen ekuitas dalam menjalankan usaha?; (2) Bagaimana penerapan manajemen ekuitas oleh Pelaku usaha dalam menjalankan usaha?; (3) Apa kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan manajemen ekuitas?. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman dan penerapan pelaku usaha UMKM terkait manajemen ekuitas berdasar *economic entity assumption* untuk menjalankan usahanya. Peneliti juga berusaha menggali informasi terkait kendala-kendala penerapan manajemen ekuitas, dan kendala lain yang membatasi keberlangsungan usaha mereka. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat membuka banyak diskusi terkait manajemen ekuitas pada UMKM. Peneliti berharap hasil yang didapat mampu memberikan gambaran kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan, tentang keadaan pelaku usaha UMKM di Indonesia dan memberikan solusi atas kendala manajemen ekuitas berdasar pada *economic entity assumption*.

METODE

Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Populasi data penelitian ialah seluruh UMKM di daerah Jakarta Barat. Peneliti mengambil sampel lima (5) usaha yang tergolong ke dalam UMKM berdasar PP Nomor 7 Tahun 2021. Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan.

a. *In-Depth Interview*

Wawancara secara mendalam didesain secara semi-terstruktur dilakukan kepada pelaku usaha sebagai objek. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan dan mengembangkannya di saat pelaksanaan *in-depth interview*. Desain pertanyaan wawancara didasarkan pada pertanyaan penelitian yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema. Dari tema-tema yang sudah ditentukan tersebut, peneliti mengembangkan ke dalam butir-butir pertanyaan wawancara.

b. Observasi dan Inspeksi Dokumen

Selain teknik wawancara, data penelitian juga dikumpulkan dengan pengamatan berupa observasi dan inspeksi dokumen. Hal ini dilakukan guna untuk peneliti menyaksikan dan membuktikan secara langsung apakah jawaban-jawaban yang diberikan sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Inspeksi dokumen diperuntukkan khususnya untuk dokumen-dokumen terkait penatakelolaan keuangan terkait manajemen ekuitas (apakah terdapat pencatatan keuangan atau pembukuan secara akuntansi; apakah terdapat anggaran; apakah terdapat bukti-bukti transaksi). Pengamatan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat sistem pencatatan atau pembukuan ekuitas untuk usaha mereka.

Analisis Data

Triangulasi teknik atau triangulasi data merupakan metode penggabungan data-data yang bersifat beda namun berasal dari objek atau subjek penelitian yang sama (Creswell, 2009). Metode triangulasi teknik dalam penelitian ini mengakumulasi data-data yang diperoleh dari *in-depth interviews* dan pengamatan. Data Wawancara (*In-Depth Interview*) dianalisis dengan beberapa tahap analisis tematik (Creswell, 2009). Penulis pertamanya menerapkan tahap “induktif” atau “*bottom-up*” dengan sebisa mungkin mengeksplor tujuan-tujuan penelitian tanpa mengindahkan teori atau skema analitis di dalamnya. Penulis menyusun transkrip wawancara dan membaca secara berulang transkrip untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap data. Langkah berikutnya, penulis menetapkan kode dan mengelompokkan kelompok kode berdasarkan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memulai wawancara, responden diminta mengisi data diri yang akan digunakan untuk penilaian level kelas UMKM. Data responden tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Responden Penelitian

No.	Kode UMKM	Umur Usaha	Jumlah Karyawan	Estimasi Nilai Aset Bersih (Rp)	Rata-rata Pendapatan Per Tahun (Rp)	Level UMKM
1.	TS	3 tahun	2 orang	250 juta	420 juta	Mikro
2.	AM	15 tahun	6 orang	2 miliar	11 miliar	Kecil
3.	AT	35 tahun	4 orang	5 miliar	20 miliar	Menengah
4.	PR	32 tahun	4 orang	>100 juta	120 juta	Mikro
5.	SJ	20 tahun	5 orang	70 juta	550 juta	Mikro

Sumber: Data primer, diolah 2022

Penentuan level UMKM didasarkan pada PP Nomor 21 Tahun 2021. Peneliti mengategorikan pemahaman dan penerapan manajemen ekuitas masing-masing usaha ke dalam beberapa proksi yaitu kas usaha (masuk/keluar), aset tetap, utang usaha, modal usaha, dan laba usaha. Masing-masing proksi dijabarkan ke dalam butir-butir pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan manajemen ekuitas para pelaku usaha.

1. Pemahaman Manajemen Ekuitas Pelaku Usaha

Pelaku usaha, baik di level mikro, kecil, maupun menengah, sudah cukup paham tentang konsep manajemen ekuitas. Pelaku usaha tersebut mampu mendefinisikan proksi-proksi dalam manajemen ekuitas.

“Yaa harus dipisah ya utang usaha dengan utang pribadi” (AM2-16)

“Laba usaha adalah selisih antara pendapatan usaha dengan apa.. pengeluaran-pengeluaran itu kan” (AM2-17)

“Beda dong omzet dengan laba. Omzet ya sama dengan pendapatan” (AM2-18)

“Yaa modal itu yang digunakan untuk membangun usaha dari awal” (PR4-3)

“Aset tetap paling Gedung ini yaa kan rumah sendiri. Kalau kendaraan untuk usaha paling motor, tapi dipakai untuk keperluan pribadi juga” (SJ5-3)

Penggunaan uang hasil usaha ditanggapi dengan jawaban yang konsisten oleh pelaku usaha, bahwa hasil usaha digunakan kembali untuk membeli keperluan dagang, selebihnya akan ditabung. Pemahaman akan pentingnya menabung untuk ekspansi bisnis sudah disadari dengan baik, meskipun kenyataannya belum ada penerapan pencatatan terpisah antara ekuitas milik usaha dengan milik pribadi.

“Dipakai untuk beli barang jualan lagi mba. Yaa pasti dipakai keperluan lain juga di luar usaha. Namanya aja usaha ini kan supaya bisa makan, untuk bayar sekolah anak, pasti kalo dapat labanya untuk kebutuhan sehari-hari mba.” (TS1-16)

“Iya ditabung untuk ngembangin usaha juga” (AM2-20)

“Yah 70:30 lah, 70 untuk usaha, 30 untuk ditabung.. tapi disesuaikan dengan kebutuhan, tidak selalu bisa begitu, tapi ya rata-rata diusahakan bisa disisihkan untuk keperluan mendatang.” (AT3-20)

“Hasil usaha tentu ditabung dan digunakan untuk usaha.” (SJ5-6)

“Yaa kalau ada laba itu ditabung untuk penambahan modal. Dapat penjualan segini trus kita pakai untuk beli barang lagi stocknya ditambah lagi yaa nanti kalau ada sisanya baru disisihkan.” (PR4-10)

2. Penerapan Manajemen Ekuitas Usaha

Meskipun pemahaman pelaku usaha di level mikro, kecil, maupun menengah sudah cukup baik terkait manajemen ekuitas, namun khususnya bagi usaha mikro, pencatatan atau pembukuan ekuitas milik usaha terkendala oleh sumber daya yang terbatas.

“Yaa penting juga sih mba. Tapi sekarang ini modal dulu, kalau sudah ada modal, sudah bisa berkembang tokonya mau pakai cara kelola keuangan bagaimana aja bisa dipelajari lah. kalau ada tenaga yang bisa kelola keuangan pasti bisa dan lebih bagus nanti usaha kami bisa lebih berkembang.” (TS1-22)

“Yaa pengelolaan keuangan itu penting.. kalau keuangannya tidak dikelola kan jadi bingung yaa.. misal kita ada stock barang 10 kalau sisa sedikit sudah harus restock. Itu kan dipikirkan juga gimana kelola uangnya supaya ada di saat mau restock.. yaa jangan dipakai hal-hal di luar usaha nanti malah habis hahaha... gak bisa berkembang usaha kita..” (PR4-9)

“Pengelolaan keuangan penting, seharusnya memang ada pencatatan keuangan yang memadai. Tapi yaa itu tadi kami terpaksa harus cut anggaran semenjak pandemi jadi tenaga untuk kelola keuangan seperti dulu sudah tidak ada..” (SJ5-12)

Pelaku usaha mikro belum bisa menerapkan manajemen ekuitas dengan baik. Penerapan manajemen ekuitas hanya sebatas pencatatan pada nota atau secara manual pada buku kas masuk dan kas keluar, dan cenderung terbatas pada hal-hal yang diingat saja.

“Dicatet di buku nota itu aja mba supaya inget (utang usahanya)” (TS1-11)

“Yaa utang dagangan jadi utang sendiri juga kan yang buka usaha saya sama suami, jadi yaa utang usaha jadi utang kita juga masuknya” (TS1-12)

“Kami catat masuknya uang setiap malam hari berapa, supaya ingat saja. Yaa kalau belanja-belanja diputer lagi uang itu” (TS1-15)

“Ngga dicatet sih yaa modalnya berapa dipake aja langsung mba hehe” (TS1-6)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa PR pernah menggunakan aplikasi akuntansi Zahir yang diberikan pembinaan oleh pemerintah. Namun pembinaan

penggunaan aplikasi tersebut hanya berlangsung jangka pendek, serta tidak ada tenaga yang cukup menyebabkan PR kesulitan untuk melanjutkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan tersebut. Urgensi penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan juga dirasa kurang oleh pelaku usaha.

“Dulu pernah dapat pelatihan keuangan, pakai Zahir. Ada juga aplikasi lain yang berbayar begitu... pernah kita aplikasikan, tapi yaa tidak ada waktu dan tenaga yang cukup untuk melakukan itu terus, jadi tidak berjalan sampai sekarang.. kita tidak ada pembukuan sama sekali yaa.. tapi sudah tau masuknya berapa, dapatnya berapa, kan dari selisih berapa uang masuk dari penjualan sama uang keluar untuk beli barang dari Cirebon itu..” (PR4-17)

Pandemi covid-19 juga menjadi halangan bagi pelaku usaha SJ. Mereka terpaksa harus memotong biaya gaji karyawan sehingga tidak ada tenaga kerja yang menangani pengelolaan keuangan, pembukuan secara akuntansi, seperti saat sebelum pandemi.

“Dulu sewaktu belum pandemi ada pencatatannya, tapi karena pandemi terpaksa harus potong anggaran jadi cut karyawan, khususnya yang di bagian keuangan itu sehingga tidak ada pencatatan sedetil dulu lagi.” (SJ5-2)

“Yaa karena sejak pandemi ini sudah tidak ada pencatatan yang terpisah secara rinci seperti dulu jadi sekarang uangnya tercampur dengan keperluan pribadi” (SJ5-7)

3. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan manajemen ekuitas

Seperti telah disebutkan di atas, kendala terbesar yang dirasakan pelaku usaha untuk menerapkan manajemen ekuitas di usahanya yaitu waktu dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melaksanakan pengelolaan ekuitas keuangan dengan baik. Adapun kendala lain yang diungkapkan oleh pelaku usaha cukup beragam, didasarkan pada jenis usahanya. Selain pengelolaan keuangan, kendala lain yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha yaitu kendala dalam pemasaran produk.

“Masalah pemasaran sih mba.. buat bisa ekspor itu.. cari ownernya yang mau. (PR4-7) Kendala Bahasa ya mba masih kurang.. kalau mau ekspor begitu harus bisa komunikasi dengan baik sama orang luar yang mau pesannya itu.. harusnya ada pengantarnya.. kalau ekspor itu kendalanya Bahasa” (PR4-20)

“Kendala untuk pemasarannya ya karena sudah banyak kompetitor, bahkan pemasok kita saja juga buka akun Instagram sendiri untuk pemasaran langsung.. di masa pandemi ini yaa meskipun minat untuk memelihara ikan tinggi tapi daya beli konsumen kan menurun yaa..” (SJ5-9)

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan atas hasil *in-depth interviews* dan pengamatan, peneliti menemukan tiga kesimpulan utama yaitu (1) Pemahaman pelaku usaha tentang Manajemen Ekuitas tidak sebanding dengan level kelas UMKM; (2) Penerapan Manajemen Ekuitas sebanding dengan level kelas UMKM; (3) Pelaku usaha memiliki kesadaran untuk penerapan manajemen ekuitas yang baik namun belum cakap ilmu dan belum cukup dana untuk menerapkannya.

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan sudah dimiliki oleh para pelaku UMKM. Namun penerapan pengelolaan keuangan dianggap belum menjadi prioritas bagi usaha mereka. Terlebih lagi, kendala biaya dan sumber daya manusia menjadi alasan mereka untuk tidak mengindahkan pola manajemen ekuitas berdasar *economic entity assumption*.

Belum ada penerapan pemisahan kepemilikan entitas usaha dengan kepemilikan pribadi terjadi pada usaha di level mikro. Hal ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam usaha mengembangkan dan menaikkan UMKM mikro. Bahwasannya memang dengan adanya kebijakan pengelompokan level UMKM yang baru, PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah mendapati kelompok usaha mikro yang sangat besar, sedangkan hanya tersisa segelintir usaha yang masuk level kecil dan menengah. Dengan adanya kebijakan yang baru tersebut, pemerintah menyatakan komitmen untuk menaikkan level usaha mikro sehingga bisa naik kelas. Maka melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat menjadikan isu manajemen ekuitas pada UMKM sebagai fokus tema dalam pembinaan dan pendampingan secara berkala, khususnya pada usaha mikro. Bagaimana agar UMKM, khususnya usaha mikro, memiliki pencatatan yang terpisah antara kepemilikan usaha dengan kepemilikan pribadi, sebab bilamana pelaku usaha sudah bisa menerapkan manajemen ekuitas dengan baik, *sustainability* usahanya dapat dipertanggungjawabkan.

Studi kualitatif ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Hasil penelitian ini akan dapat dikonfirmasi lebih lanjut dan data penelitian akan lebih andal dengan didukung oleh metode pengumpulan data yang lain. Peneliti berikutnya dengan topik serupa dapat menggunakan metode seperti kuesioner atau pelaksanaan simulasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

PUSTAKA ACUAN

- Creswell, J. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ikatan Akuntan Indonesia . (2022, April 1). *Standar Akuntansi*. Retrieved from iaiglobal: <https://web.iaiglobal.or.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: IAI.
- Irawan, W., & Wardhani, R. S. (2021). Economic Entity Concept, Penata Keuangan Dan Aplikasi Lamikro Era Industri 4.0. *Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha*, 23-44.
- Kemenkopukm. (2022, Februari 4). *Komitmen Pemerintah Dalam Pemberdayaan KUMKM Melalui Penerbitan Berbagai Peraturan Menteri*. Retrieved from kemenkopukm: kemenkopukm.go.id
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2022, May 25). *Dashboard ODS UMKM*. Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: <http://umkm.depkop.go.id/>
- Larasdiputra, G. D. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Economic Entity Concept. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 11(3), 653-664.
- Ratminingsih, N. M. (2010). Penelitian Eksperimental Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua. *PRASI Undiksha*, 30-35.
- Sari, D. P. (2013). Telisik Perlakuan Teori Entitas Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 165-329.
- Setyorini, I. N. (2010). *Pelatihan akuntansi UMKM bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta.
- Siyoto, S. &. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Toarik, M. (2021, Desember 28). *Pembiayaan Murah dan Mudah Jadi Kunci Utama UMKM untuk Naik Kelas*. Retrieved from Investor.id: <https://investor.id/finance>
- Warsono, S. (2010). *Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktekkan*. Asgard Chapter.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso , D. E. (2010). *Accounting Principles*. United States: John Wiley & Sons, Inc.

Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Aggressiveness* dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Dina Hanifa^{1*}, Yulianti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: ¹dina.hanifa18@mhs.uinjkt.ac.id; ²yulianti@uinjkt.ac.id

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

The Covid-19 pandemic has resulted in health and socio-economic crises around the world, and not a few companies have implemented tax aggressiveness to reduce the company's burden. Providing incentives by the government can be used to carry out tax aggressiveness by using regulatory loopholes during a pandemic. This study aims to examine the effect of earnings management, leverage, and inventory intensity on tax aggressiveness with an independent commissioner as a moderating variable. The sample for this research is health sector companies listed on the IDX in 2020-2021. The sample used was 136. The data analysis method used was descriptive statistical data analysis, classical assumption test, and moderated regression analysis. The results show that earnings management and leverage have a negative effect on tax aggressiveness. Inventory intensity has a positive effect on tax aggressiveness. Independent commissioners are unable to moderate earnings management on tax aggressiveness. Independent commissioners can moderate leverage and inventory intensity on tax aggressiveness.

Keywords: *Earnings Management, Leverage, Inventory Intensity, Tax Aggressiveness, Independent Commissioner.*

Abstrak

Pandemi *Covid-19* mengakibatkan krisis kesehatan dan sosial ekonomi di seluruh dunia, dan tidak sedikit perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban perusahaan. Pemberian insentif oleh pemerintah bisa dimanfaatkan untuk melakukan agresivitas pajak dengan menggunakan celah regulasi pada masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, *leverage*, dan *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. Sampel yang digunakan sebanyak 136. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Komisaris independen tidak mampu memoderasi manajemen laba terhadap *tax aggressiveness*. Komisaris independen dapat memoderasi *leverage* dan *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness*.

Kata kunci: Manajemen Laba, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Tax Aggressiveness*, Komisaris Independen

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia maka membutuhkan dana yang sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (*Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanannya*, 2013).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2019 - 2021.

Tahun	2019	2020	2021
Target (dalam triliun rupiah)	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.332,06	1.072,1	1.277,5
Capaian	84,44%	89,42%	103,9%

Sumber: LAKIN DJP 2020 dan kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak per 30 Desember 2020 sebesar Rp.1.072,1 triliun lebih kecil dari target penerimaan pajak tahun 2020, ini terjadi karena pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan krisis kesehatan dan sosial ekonomi di seluruh dunia. Sedangkan, realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2021 mencapai Rp.1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021. Hal ini membuktikan bahwa pemberian fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah sudah menghasilkan perbaikan ekonomi yang sudah mulai membaik (Handayani, 2022).

Pada Oktober 2020, pemerintah memberikan insentif *super tax deduction* untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Peraturan ini menegaskan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Insentif ini diberikan dengan harapan industri farmasi dapat mengembangkan produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Direktur Utama Kalbe Farma, Vidjongtius menyatakan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah akan menambah motivasi dari berbagai pihak untuk berinovasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin *Covid-19*. Namun, menurut Suhaidar et al. (2020) dan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan bahwa pandemi *Covid-19* dapat mendorong agresivitas pajak dengan memanfaatkan regulasi pajak baru yang telah disesuaikan dengan kondisi masa pandemi. Hal ini terjadi karena proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak tidak sebanding dengan tingginya jumlah permohonan bantuan atas program yang diberikan oleh pemerintah.

Kasus penghindaran pajak pada sektor kesehatan pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. RNI pada tahun 2014. PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, tetapi perusahaan tersebut menggantungkan hidupnya dari utang afiliasi dengan kata lain pemilik yang berada di Singapura tidak menanamkan modalnya melainkan memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, dimana ketika timbul bunga dari utang tersebut dianggapnya sebagai dividen, dengan memasukkan modal perusahaan sebagai utang maka

ini dapat mengurangi pajak perusahaan. PT RNI melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari utang yang mengakibatkan timbulnya beban bunga yang akan mengurangi pendapatan perusahaan dan memberikan pengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Ini sejalan dengan teori agensi yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dimana pemerintah bertindak sebagai *principal* dan perusahaan bertindak sebagai *agent*. Pemerintah menginginkan wajib pajak yaitu perusahaan, untuk membayar pajak dengan benar, tetapi manajer perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Arizoni et al. (2020) mengatakan bahwa salah satu faktor yang diprediksi dapat menyebabkan terjadinya tindakan agresivitas pajak adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan keuntungan pribadi. Dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa manajer dapat memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prosedur pilihannya, hal ini menyebabkan manajer dapat melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba atau menurunkan laba untuk memanipulasi laporan keuangan demi mencapai tujuan tertentu. Dengan melakukan manajemen laba, perusahaan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya (Pratiwi & Oktaviani, 2021). Selain manajemen laba, faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan agresivitas pajak adalah dengan *leverage* yaitu penggunaan dana yang berasal dari utang atau pinjaman oleh perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Semakin perusahaan banyak menggunakan dana dari pihak eksternal atau utang maka semakin tinggi juga *leverage* nya, *leverage* yang tinggi berasal dari utang dan diiringi oleh beban bunga yang menjadi beban tetap yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sengaja memanfaatkan beban bunga untuk agresivitas pajak. Intensitas persediaan yang tinggi juga merupakan faktor terjadi agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan timbulnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang akan mengurangi laba perusahaan yang juga akan menyebabkan beban pajak menjadi lebih kecil. Perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki tingkat intensitas persediaan yang tinggi. Jadi, jika intensitas persediaan perusahaan tinggi, maka akan menghasilkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi (Ahdiyah & Triyanto, 2021; Arizoni et al., 2020; Isnanto, 2019; Maulana, 2020).

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi tindakan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan adalah dengan hadirnya komisaris independen. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang mempunyai peran untuk memberi saran dan melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka pengawasan kinerja manajemen terkait pelaporan beban pajak perusahaan secara wajar juga semakin meningkat (Muliawati & Karyada, 2020).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2021 dengan menggunakan laporan keuangan kuartal. Data yang digunakan

adalah data sekunder yang didapat dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan aplikasi EViews versi 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* perusahaan yang bersangkutan selama periode kuartal I tahun 2020 sampai kuartal IV tahun 2021. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun prosedur pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sektor Kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021	23
2.	Perusahaan sektor Kesehatan yang tidak terdaftar secara berturut-turut di BEI tahun 2020-2021	(3)
3.	Perusahaan sektor Kesehatan yang tidak menerbitkan laporan keuangan kuartal secara berturut-turut di BEI tahun 2020-2021	(3)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		17
Tahun penelitian 2020-2021 (quarter)		8
Jumlah sampel data yang digunakan (17 x 8 quarter)		136

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini ada sebanyak 17 perusahaan, sehingga dalam 8 kuartal penelitian diperoleh 136 data pengamatan yang akan digunakan sebagai sampel.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel pada penelitian meliputi *tax aggressiveness*, manajemen laba, *leverage*, *inventory intensity*, dan komisaris independen yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Dekskriptif

	TA	ML	LEV	INV	KI
Maximum	0.371772	0.547180	4.398163	0.386535	0.666667
Minimum	0.076074	-0.000978	0.048148	0.003543	0.250000
Mean	0.231918	0.003951	0.859440	0.117291	0.472374
Std. Dev	0.084722	0.046927	0.848934	0.099296	0.103566
Observations	136	136	136	136	136

Sumber: Output EViews yang diolah

Pada tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa variabel *tax aggressiveness* memiliki nilai maksimum 0.371771 nilai minimum 0.076074, nilai rata-rata 0.231918 dan nilai standar deviasi 0.084722. Untuk variabel manajemen laba memiliki nilai maksimum 0.547180, nilai minimum -0.000978, nilai rata-rata 0.003951 dan nilai standar deviasi 0.046927. Variabel *leverage* memiliki nilai maksimum 4.398163, nilai minimum 0.048148, nilai rata-rata 0.859440 dan nilai standar deviasi 0.848934. Variabel *inventory intensity* memiliki nilai maksimum 0.386535, nilai minimum 0.003543, nilai rata-rata 0.117291 dan nilai standar deviasi 0.099296. Untuk variabel komisaris independen memiliki nilai maksimum 0.666667, nilai minimum 0.25, nilai rata-rata 0.472374 dan nilai standar deviasi 0.103566.

Pemilihan dan Pengujian Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang tepat dalam penelitian maka diperlukan beberapa pengujian. Terdapat tiga pengujian untuk memilih model terbaik yaitu uji *chow*, uji *langrage multiplier*, dan uji *hausman*.

Tabel 4. Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Prob.
Cross-section Chi-square	0.0000

Sumber: Output EViews yang diolah

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 sehingga ditolak dan diterima yang berarti model regresi yang digunakan adalah model *fixed effect (FE)*.

Tabel 5. Hasil Uji *Langrage Multiplier*

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	(0.0000)	(0.7929)	(0.0000)

Sumber: Output EViews yang diolah

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 sehingga ditolak dan diterima yang berarti model regresi yang digunakan adalah model *random effect (RE)*.

Tabel 6. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.3425

Sumber: Output EViews yang diolah

Berdasarkan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,3425 sehingga diterima dan ditolak yang berarti model regresi yang digunakan adalah model *random*

effect (RE). Dari ketiga pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang terbaik untuk penelitian ini adalah model *random effect (RE)*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil dari pemilihan model yang terpilih adalah model *random effect (FE)*. Model *random effect (FE)* menggunakan metode *generalized least square (GLS)* dengan asumsi bebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dan multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Sebelum *Winsorizing*

Skewness	Kurtosis	Probability
10.91620	124.6639	0.000000

Sumber: Output EViews yang diolah

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *probability* sebesar 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal, dalam statistika data yang tidak berdistribusi normal dapat dilakukan dengan cara transformasi data ke bentuk lainnya, melakukan *trimming* yaitu membuang data *outlier*, dan melakukan *winsorizing* yaitu mengubah nilai data yang *outlier* ke suatu nilai tertentu (Erlina & Mulyani, 2007).

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Setelah *Winsorizing*

Skewness	Kurtosis	Probability
-0.447845	3.165118	0.095339

Sumber: Output EViews yang diolah

Setelah dilakukan *winsorizing* maka hasil yang didapatkan berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, nilai *probability* pada model *Skewness/Kurtosis* sebesar 0,095339 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi persyaratan karena nilai *probability* lebih dari 0,05.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

	ML	LEV	INV	KI
ML	1.000000	0.059909	0.036634	-0.061144
LEV	0.059909	1.000000	0.142185	0.077787
INV	0.036634	0.142185	1.000000	-0.067251
KI	-0.061144	0.077787	-0.067251	1.000000

Sumber: Output EViews yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 10. Hasil Regresi Model *Random Effect* (RE)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.220770	0.024371	9.058837	0.0000
ML	-49.15052	68.85960	-0.713779	0.4767
LEV	-0.186318	0.051131	-3.643933	0.0004
INV	1.399370	0.525617	2.662336	0.0087
MLKI	123.0831	172.1487	0.714981	0.4759
LEVKI	0.409840	0.095039	4.312346	0.0000
INVKI	-2.946729	1.151750	-2.558481	0.0117

Sumber: Output EViews yang diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi yang disajikan pada Tabel 10 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = 0.220770 + -49.15052 ML + 123.0831 MLKI$$

$$Y = 0.220770 + -0.186318 Lev + 0.409840 LevKI$$

$$Y = 0.220770 + 1.399370 Inv + -2.946729 InvKI$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.221041
Adjusted R-squared	0.184811

Sumber: Output EViews yang diolah

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,184811 atau 18,4%. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel manajemen laba, *leverage*, *inventory intensity*, variabel interaksi antara manajemen laba dan komisaris independen, variabel interaksi antara *leverage* dan komisaris independen, dan variabel interaksi antara *inventory intensity* dan komisaris independen mampu menjelaskan 18,4% variabel dependen yaitu *tax aggressiveness*, sedangkan sisanya 81,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini

Hasil Uji Statistik t

Nilai t tabel untuk model regresi dalam Tabel 10 yaitu $t(\alpha / 2; n - k - 1) = (0,05 / 2; 136 - 3 - 1) = (0,025; 132) = 1,97810$. Nilai t hitung berpengaruh jika, t hitung > t tabel. Nilai signifikan manajemen laba sebesar $0.4767 > 0.05$ yang artinya manajemen laba

tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* sebesar -0.713779 . Nilai signifikan *leverage* sebesar $0.0004 < 0.05$ yang artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung *leverage* terhadap *tax aggressiveness* sebesar -3.643933 . Nilai signifikan *inventory intensity* sebesar $0.0087 < 0.05$ yang artinya *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness* sebesar 2.662336 . Nilai signifikan variabel interaksi manajemen laba dengan komisaris independen sebesar $0.4759 > 0.05$ yang artinya variabel interaksi manajemen laba dengan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung variabel interaksi manajemen laba dengan komisaris independen terhadap *tax aggressiveness* sebesar 0.714981 . Nilai signifikan variabel interaksi *leverage* dengan komisaris independen sebesar $0.0000 < 0.05$ yang artinya variabel interaksi *leverage* dengan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung variabel interaksi *leverage* dengan komisaris independen terhadap *tax aggressiveness* sebesar 4.312346 . Nilai signifikan variabel interaksi *inventory intensity* dengan komisaris independen sebesar $0.0117 < 0.05$ yang artinya variabel interaksi *inventory intensity* dengan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, nilai t hitung variabel interaksi *inventory intensity* dengan komisaris independen terhadap *tax aggressiveness* sebesar -2.558481 .

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel dengan arah positif ($0.713 < 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.47 lebih besar dari 0.05 . Maka dapat disimpulkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sehingga **(H₁) ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Krisnugraha et al. (2021); Mustika et al. (2020); Prawirodiharjo et al. (2020) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Tidak ada pengaruh antara manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* bisa disebabkan oleh kondisi perusahaan yang tidak normal pada periode penelitian, hal tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi sebagian besar perusahaan sehingga terjadi perubahan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah terjadi pandemi *Covid-19*. Menurut Mustika et al. (2020) tidak ada pengaruh antara manajemen laba terhadap agresivitas pajak juga bisa disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang tidak terlalu besar.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel dengan arah negatif ($-3.64 > 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.0004 lebih kecil dari 0.05 . Maka dapat disimpulkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* sehingga **(H₂) ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Putriningsih et al. (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Pengaruh yang negatif memiliki arti jika *leverage* tinggi maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini

dikarenakan timbulnya beban bunga yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan menurun dan juga akan mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Oleh sebab itu, jika laba perusahaan menurun akibat beban bunga yang tinggi maka peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga menurun (Putriningsih et al., 2019).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel dengan arah positif ($2.662 > 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.0087 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* sehingga **(H₃) diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Maywanti & Asih (2021; Rusli (2021); Sumiati & Ainnyya (2021) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga biaya yang harus ditanggung untuk membiayai pemeliharaan persediaan tersebut, biaya pemeliharaan persediaan akan mengurangi laba perusahaan dan akan berdampak pada berkurangnya pajak yang akan dibayarkan (Sumiati & Ainnyya, 2021).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, variabel interaksi manajemen laba dengan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel dengan arah positif ($0.714 < 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.47 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* sehingga **(H₄) ditolak**. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan kinerja manajemen untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, hal ini bisa disebabkan karena banyaknya dewan komisaris independen dalam perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku, sehingga banyaknya dewan komisaris independen di dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi tindakan manajemen menggunakan praktik manajemen laba sebagai upaya penghindaran pajak (Yossanda & Rahmanto, 2021).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, variabel interaksi *leverage* dengan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel dengan arah positif ($4.312 > 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax aggressiveness* sehingga **(H₅) diterima**. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Muliawati & Karyada (2020); Rani et al. (2021); Wicaksana et al. (2021) yang menyatakan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh hubungan antara *leverage* terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah komisaris independen di dalam perusahaan dapat mempengaruhi perilaku manajer yang menjadikan utang sebagai upaya dalam melakukan penghindaran pajak (Muliawati & Karyada, 2020).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10, variabel interaksi *inventory intensity* dengan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena

hasil uji statistik menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel dengan arah negatif ($-2.558 > 1.978$). Selanjutnya tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0.00117 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness* sehingga (**H₆**) diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari (Sitorus & Bowo, 2018) menyatakan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh hubungan antara *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat menimbulkan risiko rusak atau usang yang akan berdampak pada kerugian perusahaan. Dengan adanya komisaris independen dapat membatasi upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan menyimpan persediaan yang terlalu besar (Pratama & Suryarini, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *tax aggressiveness*, *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*, *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*, komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax aggressiveness*, dan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *leverage* dan *inventory intensity* terhadap *tax aggressiveness*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbatas pada periode tahun 2020-2021. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah disarankan untuk menambah atau mengganti variabel independen yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*, menggunakan proksi yang berbeda agar dapat dibandingkan, memperluas populasi dan sampel penelitian, dan menambahkan tahun penelitian guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat.

PUSTAKA ACUAN

- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of financial distress, firm size, fixed asset intensity, and inventory intensity on tax aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49–59.
- Arizoni, S. S., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2020). The effect of accrual earnings management, real earnings management and inventory intensity towards tax aggressivity: the moderating role of foreign operation. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 35–47.
- Erlina, & Mulyani, S. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Pertama). USU Press.
- Handayani, R. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp 2 Ribu Triliun*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/ekonomi/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp-2-ribu-triliun/>
- Isnanto, H. D. (2019). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax aggressiveness* (studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2017). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3257–3264.
- Krisnugraha, B., Rahayu, T., & Supardiyono, Y. (2021). Pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Exero Journal of Research in Business and Economics*, 4(1), 127–153.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti

- dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178.155-163>
- Maywanti, K., & Asih, Y. B. (2021). Pengaruh likuiditas, intensitas persediaan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 1(3), 245–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ijebeef>
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2020). Pengaruh leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi (studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2016, 16–31. <http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2301>
- Mustika, M., Sulistyowati, S., & Wahyuni, E. N. (2020). Examining the impact of liquidity, leverage and earning management on corporate tax aggressiveness in property and real estate companies on Indonesia stock exchange. *Advances in Economics, Business and Mangement Research*, 127(Aicar 2019), 2014–2017. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.022>
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2021). The role of independent commissioners in moderating the effect of capital Intensity, inventory intensity, and profitability on tax aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 19(2), 181. <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7561>
- Pratiwi, Y. E., & Oktaviani, R. M. (2021). Perspektif leverage, capital intensity, dan manajemen laba terhadap tax aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1). <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2475>
- Prawirodiharjo, M. S., Suryani, E., & Kurnia. (2020). Pengaruh manajemen laba, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(1), 846–854.
- Putringsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Rusli, Y. M. (2021). Agresivitas perpajakan perusahaan pada masa pandemi covid-19 di negara Indonesia dan Malaysia yang dimoderasi oleh kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4213>
- Sitorus, R. R., & Bowo, A. T. (2018). Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh gcg (good corporate governance). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dampak sebelum dan selama covid-19 pada perusahaan manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Sumiati, A., & Ainniyya, S. M. (2021). Effect of profitability, leverage, size, capital intensity, and inventory intensity toward tax aggressiveness. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(3), 245–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1314>
- Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksananya*. (2013). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup_mobile.pdf
- Wicaksana, S. A., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2021). Determinan penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

bursa efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(02), 264–281. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1574>

Yossanda, T. V., & Rahmanto, B. T. (2021). Komisaris independen sebagai pemoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277>